

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

PENGAYOMAN

CAPAIAN KINERJA

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2019, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Sekjen – Divisi Administrasi				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,38	132%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	70	77,37	111%

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	90	90,99	101%
Ditjen Administrasi Hukum Umum				
Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 laporan	100%
Ditjen Hak Asasi Manusia				
Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	4 Pemda	8 Pemda	200%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemda	6 Pemda	200%
Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1 Layanan	1 Layanan	100%
Ditjen Kekayaan Intelektual				
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Banten	80%	100% (total 169 permohonan)	125%
	Presentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten	80%	100% (5 kegiatan)	125%
	Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten	80%	100% (3 kegiatan)	125%
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Banten	80%	100% (9 KIK terdaftar)	125%
Ditjen Peraturan Perundang-undangan				
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	100% (97 raperda)	125%
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	30 orang	54 orang	180%
Badan Pembinaan Hukum Nasional				
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah;	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	199 Kasus	457 kasus	230%
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	21 Kegiatan	61 kegiatan	290%

Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Daerah	1 daerah	100%
	Pelatihan /Peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta	64 peserta	128%
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM				
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	12%	12%	100%
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 Buku	1 buku	100%
Ditjen Imigrasi				
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	136.133	269.955 layanan	198%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	8,7	119%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	249	686 penyelesaian	275%
Ditjen Pemasarakatan				
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan Di Banten	90%	100%	111%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak Menuju Manusia Mandiri Yang Berguna	Persentase Mantan Narapidana/ Anak Yang Berhasil Di Banten	30%	30%	100%
Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Naripada, Anak Dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis Di Banten	10%	10%	100%

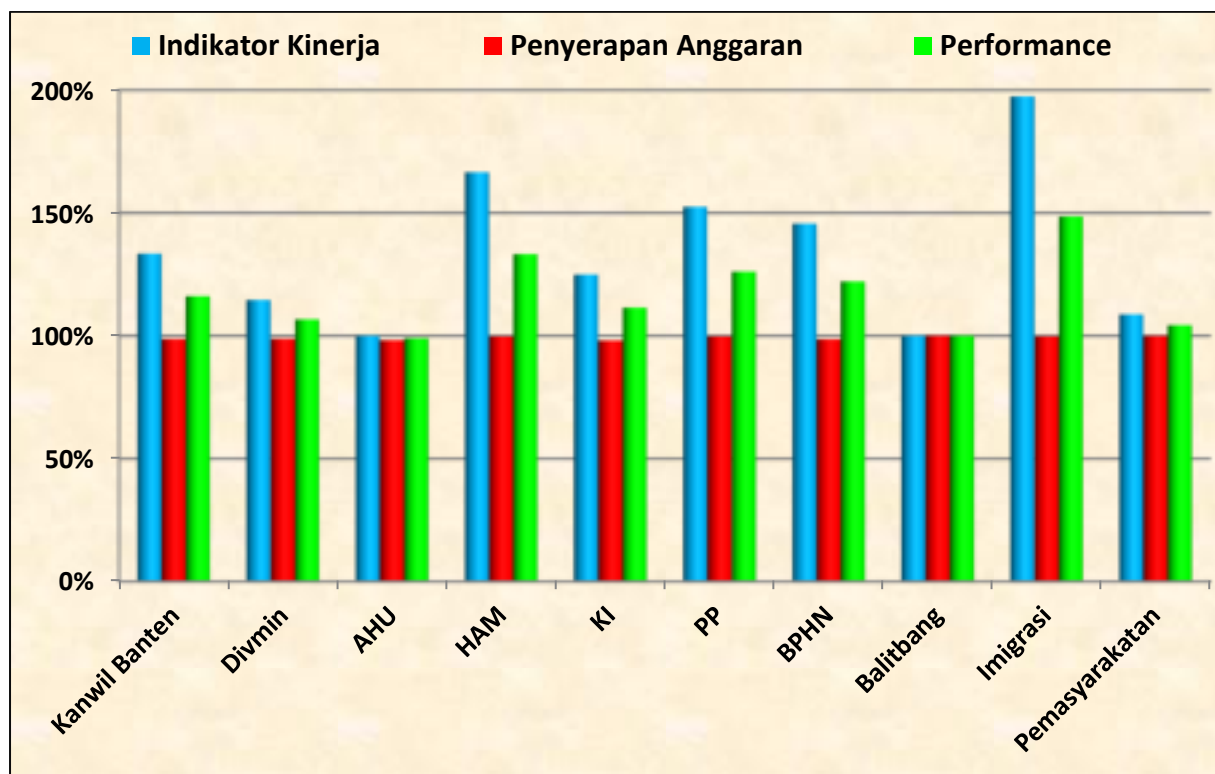
Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Masyarakat; Dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran Yang Di Kelola Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan Dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Bimbingan Masyarakat Dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Masyarakat Dan Pengawasan Sesuai Dengan standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Masyarakat Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100% (total 8 penyelesaian)	111%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten		20.142.047.000	19.889.350.777	98,75%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	12.340.103.000	12.188.735.011	98,77%
2	Program Administrasi Hukum Umum	3.500.000.000	3.433.260.566	98,09%
3	Program Pemajuan HAM	228.984.000	228.684.000	99,87%
4	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	198.057.000	194.157.000	98,03%
5	Program Pembentukan Hukum	201.200.000	200.832.000	99,82%
6	Program Pembinaan Hukum Nasional	2.094.128.000	2.066.295.000	98,67%
7	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	44.395.000	44.395.000	100%
8	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	890.000.000	888.112.200	99,79%
9	Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	645.180.000	644.880.000	99,95%

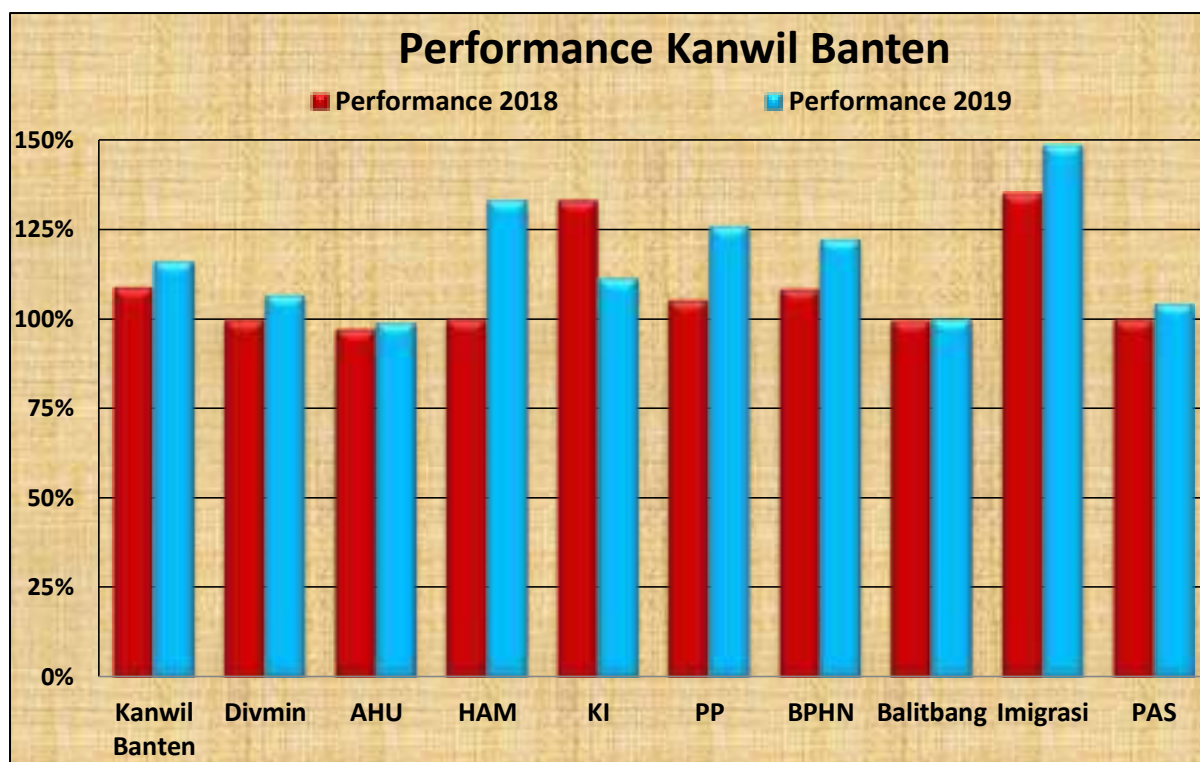
PERFORMANCE KANWIL BANTEN TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	133,51%	98,75%	116,13%
1	Sekjen - Divisi Administrasi	114,58%	98,77%	106,68%
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100,00%	98,09%	99,05%
3	Ditjen Hak Asasi Manusia	166,67%	99,87%	133,27%
4	Ditjen Kekayaan Intelektual	125,00%	98,03%	111,52%
5	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	152,50%	99,82%	126,16%
6	Badan Pembinaan Hukum Nasional	145,73%	98,67%	122,20%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	100,00%	100,00%	100,00%
8	Ditjen Imigrasi	197,55%	99,79%	148,67%
9	Ditjen Pemasarakatan	108,64%	99,95%	104.30%



PERFORMANCE KANWIL BANTEN YEAR ON YEAR (YoY)

PERFORMANCE KANWIL BANTEN								
NO	UNIT KERJA/ SATUAN KERJA	2018			2019			Performance YoY (%)
		Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	119,58%	97,75%	108,66%	133,51%	98,75%	116,13%	7,74%
1	Sekjen - Divisi Administrasi	100,00%	99,52%	99,76%	114,58%	98,77%	106,68%	6,92%
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100,00%	94,24%	97,12%	100,00%	98,09%	99,05%	1,93%
3	Ditjen Hak Asasi Manusia	100,00%	99,73%	99,87%	166,67%	99,87%	133,27%	33,41%
4	Ditjen Kekayaan Intelektual	171,25%	95,03%	133,14%	125,00%	98,03%	111,52%	-21,62%
5	Ditjen Peraturan Perundang- undangan	111,68%	98,67%	105,17%	152,50%	99,82%	126,16%	20,99%
6	Badan Pembinaan Hukum Nasional	122,37%	94,29%	108,33%	145,73%	98,67%	122,20%	13,87%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	100,00%	99,03%	99,52%	100,00%	100,00%	100,00%	0,49%
8	Ditjen Imigrasi	170,91%	99,59%	135,25%	197,55%	99,79%	148,67%	13,42%
9	Ditjen Pemasyarakatan	100,00%	99,61%	99,81	108,64%	99,95%	104,30%	4,49%



Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk periode Tahun 2019 sangat baik dengan penilaian *performance* 116,13%. Hal ini disebabkan terdapat capaian indikator kinerja yang secara signifikan jauh melebihi dari target yang telah ditentukan seperti program pemajuan HAM, program pembentukan hukum, dan program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. *Performance* tahun 2019 ini juga mengalami peningkatan sebesar 7,74% Year on Year dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa *performance* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018.

Capaian *performance* tersebut juga tercermin terhadap prestasi-prestasi penting yang telah diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan "Terbaik Kedua" kategori Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada kategori Kantor Wilayah dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak Ke-3.
3. Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan dari Bupati Serang dalam bidang Fasilitasi Legalisasi Pendaftaran Merk Tahun 2019.
4. Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai "Terbaik Pertama" kategori Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited Kategori Kantor Wilayah dengan Satker Kecil (s.d 27 Satker).
5. Kantor Wilayah Banten Sebagai "Terbaik Ketiga" dalam kategori Pemanfaatan Teknologi Informasi Terbaik dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019.
6. Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2019 kepada 5 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Banten, diantaranya LP Kls IIA Serang, LP Kls II Cilegon, LP Pemuda Kls IIA Tangerang, Rutan Kls IIB Serang, dan Rutan Kls IIB.
7. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan kepada Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Tangerang yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

8. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten atas Upayanya Mendorong Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019.

Untuk mengetahui rincian capaian *performance* berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon 1 dan Program/DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, berikut hasil capaian dari indikator kinerja dan realisasi anggaran beserta analisa atas capaian tersebut :

SEKJEN – DIVISI ADMINISTRASI

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,38	132,11%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	70	77,37	110,53%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	90	90,99	101,10%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	12.340.103.000	12.188.735.011	98,77%
a.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	145.296.000	145.291.523	99,99%
b.	Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi	61.254.000	55.943.000	91,33%
c.	Pengelolaan Data dan Informasi	12.600.000	12.500.000	99,21%
d.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	100.212.000	99.925.200	99,71%
e.	Pengelolaan Kepegawaian	165.760.000	165.760.000	100%
f.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	98.400.000	97.740.000	99,33%
g.	Pelayanan Humas dan Protokol	114.434.000	114.433.017	99,99%
h.	Reformasi Birokrasi di Wilayah	42.670.000	42.670.000	100,00%
i.	Gaji dan Tunjangan	8.780.958.000	8.662.795.797	98,65%
j.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.818.519.000	2.791.676.474	99,05%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Sekjen - Divisi Administrasi	114,58%	98,77%	106,68%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Tidak ditargetkan			7,1	9,38	132,11%	-
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Tidak ditargetkan			70	77,37	110,53%	-
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Tidak ditargetkan			90	90,99	101,10%	-
4	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
5	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
6	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
7	Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
8	Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
9	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kepada masyarakat	1	1	100%	Tidak ditargetkan			-
				100%			114,48%	14,58%

Performance Sekjen – Divisi Administrasi untuk periode Tahun 2019 mencapai 106,68%. Penilaian *performance* ditentukan berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja terkait sasaran meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang terdiri dari 3 indikator kinerja serta diukur berdasarkan realisasi anggaran dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Kementerian Hukum dan HAM yang terbagi pada 10 output sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel diatas.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2018, pada tahun 2019 terdapat kenaikan 14,58% YoY dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan trend positif dimana terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2019. Rincian hasil *performance* pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Capaian sasaran strategis Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diukur berdasarkan 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja : Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Realisasi atas indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis elektronik secara mandiri yang telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019 sesuai surat yang telah disampaikan oleh Balitbangkumham Nomor : PPH-UM.01.01-22 Hal Penyampaian Hasil Survei IPK-IKM tanggal 6 Januari 2020.

Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah sebagai berikut :

Kantor Wilayah	Responden	IPK		IKM		Responden	Integritas	
		Skala 15	Nilai Mutu	Skala 20	Nilai Mutu		Nilai	Nilai Mutu
Kanwil Banten	31	14,15	A	18,76	A	583	84,86	B

Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai IKM pada Kanwil Kemenkumham Banten sebesar 18,76 (skala 20). Jika dikonversikan menjadi skala 10 (sesuai target indikator kinerja) maka dapat diketahui indeks kepuasan layanan Kanwil Kemenkumham Banten sebesar 9,38 (skala 10). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan target indeks kepuasan layanan internal sebesar 7,1 atau telah mencapai 132,11% dari target yang telah ditetapkan.

Hasil capaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil Kemenkumham Banten, diantaranya :

- Terwujudnya Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM Kanwil Banten agar proses pelayanan lebih mudah, nyaman, dan Transparan sesuai dengan standar pelayanan publik pada Kantor Wilayah Banten.
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Standar Layanan Publik di Kantor Wilayah Banten.
- Pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah Banten.
- Pelaksanaan percepatan pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang telah dilakukan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten seperti : layanan notaris online, izin PAS digital, SNIPER (sistem notifikasi persetujuan), gerai paspor di mall (Tangcity Mall – Kota Tangerang), mobile unit pelayanan paspor, counter check-in mandiri layanan paspor, pemberitahuan aktif paspor selesai, & nonstop autoreply whatsapp (status permohonan paspor).
- Pelaksanaan transparansi informasi kepada publik melalui media Website, Instagram, Facebook, Youtube terkait layanan publik dan pelaksanaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

b. Indikator Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 masih belum diinformasikan. Oleh karena itu, Realisasi atas indikator kinerja tersebut mengacu kepada hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018 dengan nilai RB sebesar 77,37. Hasil penilaian RB tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2019 yaitu sebesar 70 dengan hasil capaian kinerja 110,53%.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja tersebut di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten diantaranya :

- Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
- Pelaksanaan pembentukan Kelompok Internalisasi 6 Area Perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Nomor : W12-035.OT.03, tanggal 24 Mei 2019.
- Pelaksanaan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

- Pelaksanaan Implementasi dan tindak lanjut pencegahan Gratifikasi, Pungutan Liar, *Whistle Blowing System (WBS)*, pengaduan masyarakat (e-Lapor), & penanganan benturan kepentingan.
- Pelaksanaan monitoring pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui aplikasi *e-performance & SMART*.
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik melalui pelaksanaan transparansi informasi kepada publik melalui media Website, Instagram, Facebook, Youtube, dan inovasi-inovasi terkait pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

c. Indikator Kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kemenkumham Banten mengacu kepada hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan Integritas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melalui surat Nomor : PPH-UM.01.01-22 Hal Penyampaian Hasil Survei IPK-IKM tanggal 6 Januari 2020. Survei IPK-IKM berbasis elektronik secara mandiri telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019 dengan hasil survei pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten adalah sebagai berikut :

Kantor Wilayah	Responden	IPK		IKM		Responden	Integritas	
		Skala 15	Nilai Mutu	Skala 20	Nilai Mutu		Nilai	Nilai Mutu
Kanwil Banten	31	14,15	A	18,76	A	583	84,86	B

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten				
Penilaian	Skala	Hasil Survei	Konversi Skala 100	Rata-rata Penilaian
IPK	15	14,15	94,33	90,99
IKM	20	18,76	93,80	
Integritas	100	84,86	84,86	

Berdasarkan hasil survei penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Integritas oleh Balitbangkumham yang telah dikonversi dalam skala 100 (sesuai target kinerja) maka diperoleh nilai rata-rata atas penilaian IPK, IKM dan Integritas adalah sebesar 90,99. Nilai tersebut menjadi dasar dalam capaian kinerja terkait penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kanwil Kemenkumham Banten. Hasil capaian indikator kinerja tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 101,10%.

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan	100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Administrasi Hukum Umum	3.500.000.000	3.433.260.566	98,09%
a.	Layanan AHU pada Kantor Wilayah	1.481.404.000	1.452.156.000	98,03%
b.	Layanan MKNM, MPW, dan MPD Notaris	1.144.138.000	1.107.511.000	96,80%
c.	Dukungan Layanan AHU di Wilayah	874.458.000	873.593.566	99,90%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Administrasi Hukum Umum	100%	98,09%	99,05%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12	12	100%	12	12	100%	0,00%
2 Terselenggaranya MKW, MPW dan MPD Notaris	12	12	100%	Tidak ditargetkan			-
			100%			100%	0%

Performance Bidang Administrasi Hukum Umum untuk periode Tahun 2019 adalah sebesar 99,05%. Penilaian performance ditentukan berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja dari sasaran terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah yang terdiri dari 1 indikator kinerja dengan target 12 laporan serta diukur

berdasarkan realisasi anggaran dari Program Administrasi Hukum Umum yang terbagi pada 3 output sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel diatas.

Dilihat dari tabel realisasi capaian kinerja secara *year on year* (YoY). Capaian indikator kinerja pada tahun 2019 sama dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2018. Untuk rincian hasil *performance* periode tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah

- a. Indikator Kinerja : Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan

Capaian sasaran Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah diukur berdasarkan indikator kinerja dengan hasil capaian pada tahun 2019 adalah 12 laporan dari target 12 laporan atau telah mencapai 100% dari target indikator kinerja. Sedangkan untuk realisasi output penyerapan anggaran pada tahun 2019 telah mencapai 98,09%. Hasil realisasi indikator kinerja tersebut sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

NO	LAPORAN KEGIATAN	TANGGAL	DAERAH	WILAYAH	JUMLAH PESERTA
1	Sosialisasi Layanan Fidusia	11-04-2019	Kec. Tangerang	Kota Tangerang	100 Orang
2		27-05-2019	Kec. Curug	Kab. Tangerang	100 Orang
3		18-06-2019	Kec. Neglasari	Kota Tangerang	100 Orang
4		20-06-2019	Kec. Kelapa Dua	Kab. Tangerang	100 Orang
5	Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan	30-04-2019	Kec. Karawaci	Kota Tangerang	75 Orang
6		25-06-2019	Kec. Cikupa	Kab. Tangerang	75 Orang
7		26-06-2019	Kec. Pondok Aren	Kota Tangsel	100 Orang
8	Sosialisasi Layanan Kenotariatan	02-04-2019	Kec. Cipeucang	Kab. Pandeglang	100 Orang
9		25-04-2019	Kec. Banjar	Kab. Pandeglang	100 Orang
10		23-07-2019	Kec. Keroncong	Kab. Pandeglang	100 Orang
11		30-07-2019	Kec. Karang Tengah	Kota Tangerang	100 Orang
12		28-08-2019	Kec. Panongan	Kab. Tangerang	100 Orang

DITJEN HAK ASASI MANUSIA

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Jumlah Pemerintah Daerah Yang	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan	4 Pemda	8 Pemda	200%

Melaksanakan Program aksi HAM	Program aksi HAM			
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemda	6 Pemda	200%
Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1 Layanan	1 Layanan	100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pemajuan HAM	228.984.000	228.684.000	99,87%
a.	Layanan HAM di Wilayah	125.257.000	124.957.000	99,76%
b.	Pembangunan HAM di Wilayah	103.727.000	103.727.000	100%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Hak Asasi Manusia	166,67%	99,87%	133,27%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	4	4	100%	4	8	200%	100%
2 Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3	3	100%	3	6	200%	100%
3 Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	1	100%	1	1	100%	0,00%
			100%			166,67%	66,67%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Hak Asasi Manusia untuk periode Tahun 2019 sangat baik dengan capaian sebesar 133,27%. Capaian tersebut besar dipengaruhi oleh hasil capaian indikator kinerja yang jauh melebihi dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja yaitu dengan capain indikator kinerja sebesar 166,67%.

Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 66,67% YoY dari tahun 2018 seperti yang ditampilkan pada tabel diatas, dimana ada peningkatan capaian kinerja atas 2 indikator kinerja pada tahun 2019. Rincian hasil *performance* Bidang Hak Asasi Manusia pada periode tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM

Capaian sasaran dari Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM diukur berdasarkan 2 indikator kinerja dengan realisasi pada periode tahun 2019 sebagai berikut :

NO	PROGRAM KAB/KOTA			KETERANGAN
	AKSI HAM	CAPAIAN AKSI HAM	PEDULI HAM	
1	Kab. Pandeglang	100,00%	Kab. Pandeglang	Minimal capaian aksi HAM \geq 75% sebagai Kab/Kota Peduli HAM
2	Kota Tangerang	100,00%	Kota Tangerang	
3	Kota Serang	93,75%	Kota Serang	
4	Kab. Serang	93,75%	Kab. Serang	
5	Kota Cilegon	81,25%	Kota Cilegon	
6	Kab. Lebak	75,00%	Kab. Lebak	
7	Kota Tangerang Selatan	62,50%		
8	Kab. Tangerang	37,50%		

a. Indikator Kinerja : Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM.

Seperti diuraikan pada tabel diatas, seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Banten melaksanakan program Aksi HAM yaitu terdapat 8 Kab/Kota dengan capaian indikator kinerja sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019.

b. Indikator Kinerja : Jumlah Kab/Kota Peduli HAM.

Berdasarkan aplikasi penilaian Peduli HAM, Kab/Kota Peduli HAM diraih dengan capaian Aksi HAM \geq 75%. Untuk capaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah Banten terdapat 6 Kab/Kota yang meraih sebagai Kab/Kota Peduli HAM seperti dijelaskan pada tabel diatas. Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah 3 Pemerintah Daerah, Maka diketahui capaian indikator kinerja tersebut sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Strategis : Jumlah Layanan HAM Di Wilayah

a. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

Capaian sasaran strategis dari Jumlah Layanan HAM Di Wilayah diukur berdasarkan 1 indikator kinerja dengan target 1 layanan. Realisasi indikator kinerja tersebut sampai dengan periode tahun 2019 telah terlaksana layanan HAM di Wilayah Banten dengan total 7 permohonan pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) selama tahun 2019. Diukur berdasarkan target indikator kinerja yaitu 1 layanan maka capaian indikator kinerja telah mencapai 100% dari target. Realisasi pelayanan komunikasi masyarakat pada tahun 2019 di Wilayah Banten sebagai berikut :

PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI WILAYAH BANTEN					
No	10 Hak Dasar	Data Dugaan Pelanggaran Permasalahan Ham Yang Dikomunikasikan			Kasus Telah di Input ke Aplikasi SIMASHAM
		Data Masuk	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi Yang Di Tindaklanjuti	
1	Hak untuk hidup	1	1	1	1
2	Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan				
3	Hak mengembangkan diri				
4	Hak memperoleh keadilan	2	2	2	2
5	Hak atas kebebasan pribadi				
6	Hak atas rasa aman				
7	Hak atas kesejahteraan	4	4	4	4
8	Hak turut serta dalam pemerintahan				
9	Hak wanita				
10	Hak anak				

DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Banten	80%	100% (seluruh permohonan diproses)	125%
	Presentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten	80%	100% (terlaksana 5 kegiatan)	125%
	Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten	80%	100% (terlaksana 3 kegiatan)	125%
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Banten	80%	100% (total 9 permohonan KIK terdaftar)	125%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	198.057.000	194.157.000	98,03%
a.	Layanan HKI di Wilayah	97.922.000	97.752.000	99,83%
b.	Penegakan Hukum di Daerah	100.135.000	96.405.000	96,28%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	125%	98,03%	111,52%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Banten	40	117	292,50%	80%	100% (169 permohonan KI)	125%	-167,50%
2 Presentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten	Tidak ditargetkan			80%	100% (5 kegiatan)	125%	-
3 Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten	Tidak ditargetkan			80%	100% (3 kegiatan)	125%	-
4 Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Banten	Tidak ditargetkan			80%	100% (9 KIK terdaftar)	125%	-
5 Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	2	1	50,00%	Tidak ditargetkan			-
			171,25%			125%	-46,25%

Performance Bidang Kekayaan Intelektual periode tahun 2019 sebesar 111,52%. Performance tersebut diukur berdasarkan capaian indikator kinerja dan capaian realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan pada tabel diatas. Capaian indikator kinerja bidang Kekayaan Intelektual mengacu kepada capaian sasaran strategis yaitu terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali.

Berdasarkan tabel realisasi kinerja year on year, terlihat capaian indikator kinerja tahun 2019 turun sebesar 46,25% YoY dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan target indikator kinerja terkait permohonan KI pada tahun 2018 ditetapkan secara jumlah yaitu 40 permohonan KI sedangkan pada tahun 2019 target ditetapkan secara persentase yaitu 80% total permohonan diterima. Namun jika dilihat dari jumlah permohonan KI pada tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 52 permohonan atau peningkatan 44,44% dari total permohonan tahun 2018. Untuk rincian capaian sasaran strategis bidang Kekayaan

Intelektual periode tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

NO	PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH BANTEN	
	JENIS	JUMLAH
1	Permohonan Paten	1
2	Permohonan Hak Cipta	16
3	Permohonan Merek	147
4	Permohonan Perpanjangan Merek	4
5	Permohonan Indikasi Geografis	1
6	Permohonan Desain Industri	0
7	Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	9

NO	KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI WILAYAH BANTEN			
	JENIS	TOTAL TAHUN 2018	PENCATATAN KIK TAHUN 2019	TOTAL TAHUN 2019
1	Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	33	9	42

NO	PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH				
	JENIS KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	WILAYAH	JUMLAH
1	Promosi dan Diseminasi				
a	Diseminasi Perlindungan Kekayaan Intelektual	27-03-2019	Gerai Tangerang Gemilang	Kab. Tangerang	50 Peserta
b	Promosi Desain Industri	29-04-2019	SMKN 2 Kota Tangerang	Kota Tangerang	50 Peserta
c	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	28-05-2019	Plaza Lebak	Kab. Lebak	50 Peserta
d	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual	17-07-2019	Balai Kota Tangerang Selatan	Kota Tangsel	50 Peserta
e	Sosialisasi Indikasi Geografis	20-08-2019	Balai Penyuluhan Pertanian Cisauk	Kab. Tangerang	50 Peserta
2	Penegakan Hukum di Daerah				
a	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	06-03-2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Cilegon	50 Peserta
b	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	15-05-2019	Kantor Kecamatan Cipeucang	Kab. Pandeglang	50 Peserta
c	Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual	10-07-2019	Gedung Cisadane	Kota Tangerang	50 Peserta

1. Sasaran Strategis : Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali

Capaian sasaran strategis terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali diukur berdasarkan 4 indikator kinerja dengan realisasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja : Persentase permohonan kekayaan intelektual yang di terima di Kantor Wilayah Banten.

Seperti yang telah dijelaskan pada tabel sebelumnya bahwa jumlah permohonan kekayaan intelektual pada tahun 2019 di wilayah Banten berjumlah 169 permohonan kekayaan intelektual. Seluruh permohonan tersebut telah di proses pada tahun 2019. Maka capaian atas indikator kinerja adalah 125% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu 80% permohonan di terima di Kantor Wilayah Banten.

- b. Indikator kinerja : Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten.

Realisasi penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten pada tahun 2019 yaitu telah dilaksanakan 5 kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual. Mengacu kepada target output pada RKA-K/L dimana target penyelenggaraan promosi dan diseminasi adalah 5 kegiatan, maka hal tersebut telah mencapai dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 maka capaian atas indikator kinerja tersebut mencapai 125% dari target yang ditetapkan yaitu 80% penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten.

- c. Indikator kinerja : Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten. Terkait realisasi penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten yaitu telah diselenggarakan 3 kegiatan pada tahun 2019 atau telah mencapai 100% Target output pada RKA-K/L untuk penegakan hukum di daerah banten yaitu 3 kegiatan. Atas hasil tersebut maka diketahui capaian indikator kinerja mencapai 125% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu 80% penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten.

- d. Indikator kinerja : Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Banten.

Total Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sampai dengan tahun 2018 terdapat 33 KIK yang telah tercatat pada Kantor Wilayah Banten. Realisasi pada tahun 2019 terdapat 9 KIK yang telah tercatat pada Kantor Wilayah Banten. Jumlah KIK yang telah tercatat sampai dengan tahun 2019 pada Kantor Wilayah Banten yaitu 42 KIK. Berdasarkan Penambahan database kekayaan intelektual komunal di Kantor Wilayah Banten, maka capaian indikator kinerja tersebut telah mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019.

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	100%	125%
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	30 Orang	54 orang	180%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pembentukan Hukum	201.200.000	200.832.000	99,82%
a.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	159.355.000	159.187.000	99,89%
b.	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Wilayah	41.845.000	41.645.000	99,52%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	152,50%	99,82%	126,16%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%	98,68% (150 raperda)	123,35%	80%	100% (175 raperda)	125%	1,65%
2	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	13	13	100%	30	54	180%	80,00%
				111,68%			152,50%	40,83%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Peraturan Perundang-undangan untuk periode tahun 2019 sebesar 126,16%. Hasil *performance* tersebut sangat baik dengan penilaian >100%. Hal ini dipengaruhi dari hasil realisasi indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan capaian sebesar 152,50%.

Seperti yang ditampilkan pada tabel realisasi indikator kinerja (YoY), capaian indikator kinerja tahun 2019 meningkat sebesar 40,83% YoY dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2019 lebih baik dibanding capaian indikator kinerja tahun 2018. Untuk rincian hasil capaian kinerja pada tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

- a. Indikator Kinerja : Persentase rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan.

Indikator kinerja terkait permohonan Raperda, target yang ditetapkan adalah 80% Raperda terfasilitasi dari total permohonan Raperda pada Kantor Wilayah Banten. Realisasi Raperda yang terfasilitasi pada tahun 2019 adalah 175 Raperda dari total 175 permohonan Raperda atau keseluruhan Raperda telah terfasilitasi sampai dengan periode tahun 2019. Berdasarkan realisasi tersebut, maka diketahui capaian atas indikator kinerja mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu 80% permohonan Raperda terfasilitasi.

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		
	WILAYAH	RAPERDA	RAPERKADA
1	Provinsi Banten	11	6
2	Kab. Serang	9	-
3	Kota Serang	11	2
4	Kab. Tangerang	23	-
5	Kota Tangerang	11	8
6	Kota Tangerang Selatan	17	61
7	Kab. Lebak	1	-
8	Kab. Pendeglang	7	-
9	Kota Cilegon	7	1
TOTAL		97	78

- b. Indikator Kinerja : Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah.

Pada tahun 2019 telah diselenggarakan 2 kegiatan pembinaan substansi perancangan

peraturan daerah dengan peserta dari 2 kegiatan tersebut berjumlah 54 orang. Maka Realisasi indikator kinerja tersebut telah mencapai 180% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 30 orang yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah. Rincian penyelenggaraan kegiatan dijelaskan pada tabel berikut :

NO	PEMBINAAN SUBSTANSI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH			
	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	PESERTA
1	Forum pendalaman materi "Pokok-pokok perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah"	29-04-2019	Ruang Rapat Kantor Wilayah Banten	23 Orang
2	Peningkatan Kompetensi Pembentukan Peraturan Daerah	09-04-2019	Ruang Rapat Sari Kuring Indah Ciracas, Serang, Banten	31 Orang
TOTAL				54 Orang

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	199 Kasus	457 kasus	230%
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	21 Kegiatan	61 kegiatan	290%
	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	1 daerah	100%
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Daerah	1 daerah	100%
	Pelatihan / Peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta	50 peserta	100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pembinaan Hukum Nasional	2.094.128.000	2.066.295.000	98,67%
a.	Bantuan Hukum Litigasi	1.499.000.000	1.478.000.000	98,60%
b.	Bantuan Hukum Non Litigasi	111.090.000	105.369.000	94,85%
c.	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	107.052.000	107.052.000	100%
d.	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	175.000.000	174.986.000	99,99%
e.	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	88.193.000	87.995.000	99,78%
f.	Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	88.193.000	87.293.000	98,98%
g.	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	25.600.000	25.600.000	100%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Badan Pembinaan Hukum Nasional	145,73%	98,67%	122,20%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	199	378	189,95%	199	457	229,65%	39,70%
2	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	21	35	166,67%	21	61	290,48%	123,81%
3	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1	1	100%	1	1	100%	0,00%
4	Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1	1	100%	1	1	100%	0,00%
5	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1	1	100%	1	1	100%	0,00%
6	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui	1	1	100%	1	1	100%	0,00%

	sistem JDHN							
7	Pelatihan / Peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	1 (kanwil)	1	100%	50 (orang)	50	100%	0,00%
				122,37%			145,73%	23,36%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Pembinaan Hukum Nasional untuk periode tahun 2019 sebesar 122,20%. Kontribusi atas capaian *performance* tersebut diperoleh atas realisasi indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan capaian sebesar 145,73%.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2018, capaian indikator kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 23,36% YoY seperti yang ditampilkan pada tabel diatas. Hal ini menunjukkan capaian kinerja tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018. hasil Rincian capaian kinerja pada Bidang Pembinaan Hukum Nasional periode tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Pada sasaran strategis tersebut terdapat 7 indikator kinerja yang menentukan hasil penilaian capaian sasaran strategis. Realisasi seluruh indikator kinerja tersebut mencapai $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator kinerja : Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi

Realisasi indikator kinerja terkait bantuan hukum litigasi pada tahun 2019 di Wilayah Banten berjumlah 457 kasus dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 199 kasus. Realisasi tersebut jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 230%.

b. Indikator kinerja : Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin

Realisasi terhadap bantuan hukum non litigasi pada tahun 2019 di Wilayah Banten yaitu telah terlaksana total 61 kegiatan bantuan hukum litigasi. Realisasi tersebut jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu 21 kegiatan bantuan hukum non litigasi dengan capaian atas indikator kinerja tersebut sebesar 290%.

NO	DAFTAR BANTUAN HUKUM TAHUN 2019	
	JENIS BANTUAN HUKUM	TOTAL BANTUAN HUKUM
1	LITIGASI	457
a	Pidana	327
b	Perdata	130
2	NONLITIGASI	61
a	Drafting Dokumen	27
b	Investigasi Kasus	1
c	Konsultasi Hukum	2
d	Penyuluhan Hukum	18
e	Pemberdayaan Masyarakat	13

- c. Indikator kinerja : Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Realisasi kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Banten telah dilaksanakan kepada penerima bantuan hukum maupun kepada pemberi bantuan hukum dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Berdasarkan tabel yang disajikan, maka indikator kinerja tersebut telah tercapai 100% dengan terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Banten. Berikut rincian pelaksanaan kegiatannya antara lain :

NO	KEGIATAN MONITORING BANTUAN HUKUM TAHUN 2019		
	TEMPAT / OBH	TANGGAL	PERKARA
1	MONITORING KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM		
a	LP KIs I Tangerang	10-10-2019	Pidana
b	LP Cilegon	11-10-2019	Pidana
c	Rutan Tangerang	11-10-2019	Pidana
d	Rutan Pandeglang	14-10-2019	Pidana
e	Rutan Rangkasbitung	15-10-2019	Pidana
f	LPKA	16-10-2019	Pidana
g	LP Anak Wanita Tangerang	17-10-2019	Pidana
h	LP Pemuda Tangerang	18-10-2019	Pidana
i	Penerima Bantuan Hukum di Kota Tangerang Selatan	21-10-2019	Perdata
j	Penerima Bantuan Hukum di Kabupaten Serang	22-10-2019	Perdata
k	Penerima Bantuan Hukum di Kota Tangerang	24-10-2019	Perdata
l	Rutan Serang	02-12-2019	Pidana
m	LP Serang	03-12-2019	Pidana
n	Penerima Bantuan Hukum di Kota Serang	04,05, & 09 Desember 2019	Perdata
2	MONITORING KEPADA PEMBERI BANTUAN HUKUM		
a	Keadilan, Matahati, Mutiara Indah, Posbankumadin	22, 23 Oktober 2019 &	

	Tangsel	01, 04 November 2019
b	Langit Biru, Sayap Bening, Syariah Tigaraksa	01, 04, & 05 November 2019
c	Posbankumadin Kota Tangerang, Posbankumadin Kab. Tangerang	27 & 29 November 2019
d	Jatramada, Mandiri, Mufti Rahman, Kebijakan Publik	06 Desember 2019

d. Indikator kinerja : Jumlah penyuluhan hukum di daerah

Realisasi atas indikator kinerja tersebut telah mencapai 100% dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Banten pada tahun 2019. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di wilayah Banten:

NO	KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT			
	WILAYAH	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH PESERTA
1	PROVINSI BANTEN			
a	Kab. Tangerang	28-02-2019	Aula Kelurahan Kadu Agung, Tigaraksa	30 Peserta
b	Tangerang	05-03-2019	Aula Kelurahan Binong, Curug	30 Peserta
c	Kota Tangerang Selatan	06-03-2019	Aula Kelurahan Rawabuntu, Serpong	30 Peserta
d	Tangerang Selatan	19-03-2019	Aula Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong	30 Peserta
e	Kab. Serang	26-03-2019	Aula Kelurahan Kareo, Jawilan	30 Peserta

e. Indikator kinerja : Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah

Realisasi indikator kinerja terkait kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah telah diselenggarakan pada tanggal 16 April 2019 bertempat di Hotel Cilegon City dengan tema kegiatan "Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum serta Peta Permasalahan Hukum Tahun 2019". Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Banten, serta perwakilan dari Sekretariat DPRD seluruh Kab/Kota di Wilayah Banten. Dengan telah terselenggaranya kegiatan tersebut maka capaian atas indikator kinerja terkait kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah telah tercapai 100%.

f. Indikator kinerja : Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
Layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN pada Kantor Wilayah Banten telah terselenggara dengan terintegrasi dengan JDIH Pemerintah Daerah di Wilayah Banten. atas realisasi tersebut maka capaian atas indikator kinerja terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN telah mencapai 100%. Rincian layanan JDIHN yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten

adalah sebagai berikut :

NO	LAYANAN JDIHN TERINTEGRASI	
	NAMA INSTANSI	TANGGAL INTEGRASI
1	JDIH Pemerintah Kabupaten Serang	12-04-2019
2	JDIH Pemerintah Kabupaten Pandeglang	21-06-2019
3	JDIH Pemerintah Kabupaten Tangerang	21-06-2019
4	JDIH Pemerintah Kota Serang	01-07-2019
5	JDIH Pemerintah Kota Tangerang	15-07-2019

- g. Indikator kinerja : Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (*tematik*)
 Realisasi indikator kinerja tersebut yaitu telah terselenggaranya kegiatan dengan tema "Melalui Bimbingan Teknis Bagi Paralegal Kita Tingkatkan Kapasitas Bagi Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Kemasyarakatan dan Paralegal". Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Aula Pusat Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dengan jumlah peserta 50 orang yang dihadiri oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / Organisasi Kemasyarakatan yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kelompok Kadarkum, dan Aparatur Sipil Negara.

BALITBANG HUKUM DAN HAM

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	12%	12%	100%
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 Buku	1	100%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM / OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	44.395.000	44.395.000	100%
	Layanan Penelitian dan Pengembangan	44.395.000	44.395.000	100%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	100,00%	100,00%	100,00%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Tidak ditargetkan			12%	12%	100%	-
2 Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	3	3	100%	1	1	100%	0,00%
3 Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	3	3	100%	Tidak ditargetkan			-
			100%			100%	0,00%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM untuk periode tahun 2019 sebesar 100%. Konsistensi capaian indikator kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM terlihat pada tabel realisasi indikator kinerja (YoY) dimana capaian indikator kinerja tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Realisasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian tersebut pada periode tahun 2019 antara lain :

1. Sasaran Strategis : Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

- a. Indikator kinerja : Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Telah terlaksananya Hasil Pengkajian Hak Asasi Manusia terkait Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika dengan sampel 80 orang dari 3 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui profil pendidikan terakhir, latar belakang pekerjaan, indikasi keterlibatan petugas, indikasi penggunaan narkotika di dalam Lapas, serta indikasi peredaran narkotika di dalam Lapas. Hasil kajian tersebut menjadi data primer untuk disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat untuk dilakukan analisa secara lebih mendalam dengan menggunakan metode yang lebih komprehensif dan akurat untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan dan penindakan kejahatan narkotika. Atas realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut maka capaian indikator kinerja telah mencapai 100%.

2. Sasaran Strategis : Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

a. Indikator kinerja : Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang di sosialisasikan di wilayah

Hasil pengkajian yang dilaksanakan tersebut telah di sosialisasikan dan dokumentasikan kedalam buku berjudul "Laporan Pengkajian Hak Asasi Manusia – Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika" yang diterbitkan terbatas pada tanggal 23 September 2019. Buku hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Pusat dan telah di arsipkan pada perpustakaan Kanwil Kemenkumham Banten. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian atas indikator kinerja telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 yaitu target 1 buku.

DITJEN IMIGRASI

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	136.133	269.955 Layanan	198%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	8,68	119%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	249	686 Penyelesaian	276%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	890.000.000	888.112.200	99,79%
	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	890.000.000	888.112.200	99,79%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Imigrasi	197,55%	99,79%	148,67%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA	2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1 Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	131.360	206.647	157,31%	136.133	269.955	198,30%	40,99%
2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	<i>Tidak ditargetkan</i>			7,3	8,675	118,84%	-
3 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	68	121	177,94%	249	686	275,50%	97,56%
4 Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	28	39	139,29%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
5 Jumlah Pengawasan Keimigrasian sesuai ketentuan	28	175	625%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
6 Jumlah layanan informasi dan komunikasi keimigrasian	12	12	100%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
7 Jumlah penyidikan keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	6	2	33,33%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
8 Jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI	2.444	2.575	105,36%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
9 Terselenggaranya layanan internal overhead	3	3	100%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-

10	Terselenggaranya layanan perkantoran	3	3	100%	Tidak ditargetkan	-
				170,91%		197,55%
						26,63%

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Keimigrasian untuk periode tahun 2019 sebesar 148,67%. Hal ini menunjukkan performance yang sangat baik dikarenakan capaian pada indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian indikator kinerja 197,55%. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 26,65% YoY. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian tersebut pada periode tahun 2019 antara lain :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan Keimigrasian

- a. Indikator kinerja : Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 terkait pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan adalah 136.133 pelayanan. Hasil yang dicapai oleh Divisi Keimigrasian merupakan akumulasi dari pelayanan keimigrasin yang dilaksanakan pada 3 Kantor Imigrasi yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan realisasi selama tahun 2019 telah terselesaikannya 269.955 pelayanan keimigrasian. Dari hasil tersebut, maka capaian atas indikator kinerja mencapai 198% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelayanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PELAYANAN	SATUAN KERJA			TOTAL
		KANIM TANGERANG	KANIM SERANG	KANIM CILEGON	
1	Penerbitan Paspor Bagi WNI	128.185	26.112	17.750	172.047
2	Penerbitan Izin Tinggal Bagi WNA	17.428	8.044	3.470	28.942
3	Pemeriksaan Crew WNI			9.420	9.420
4	Pemeriksaan Crew WNA			59.546	59.546
	TOTAL	145.613	34.156	90.186	269.955

- b. Indikator kinerja : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian
- Target nilai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian adalah 7,3. Hasil yang dicapai berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan pada 3 Kantor Imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 86,75. Jika dikonversikan ke skala 10 (sesuai dengan

skala nilai pada target yang ditetapkan) maka nilai indeks kepuasan masyarakat adalah 8,675. Berdasarkan hasil tersebut, maka target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 telah tercapai dengan capaian indikator kinerja sebesar 119%. Rincian hasil survey indeks kepuasan masyarakat pada 3 Kantor Imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	IKM UNIT PELAYANAN		KETERANGAN
		Hasil Survey	Konversi Skala 10	
1	Kantor Imigrasi Tangerang	96,25	9,625	Sangat Baik
2	Kantor Imigrasi Serang	87	8,7	Baik
3	Kantor Imigrasi Cilegon	77	7,7	Baik
RATA-RATA IKM		86,75	8,675	Baik

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian

- a. Indikator kinerja : Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 terkait penyelesaian tindak pidana keimigrasian adalah 249 penyelesaian. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian pada periode tahun 2019 secara keseluruhan adalah sebanyak 686 penyelesaian Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK). Dari realisasi tersebut, maka capaian atas indikator kinerja adalah 276% dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Banten adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK)
1	Kantor Imigrasi Tangerang	638
2	Kantor Imigrasi Serang	20
3	Kantor Imigrasi Cilegon	28
TOTAL		686

DITJEN PEMASYARAKATAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan Di Banten	90%	100%	111%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/	Persentase Mantan Narapidana/ Anak Yang Berhasil Di Banten	30%	30%	100%

Anak Menuju Manusia Mandiri Yang Berguna				
Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak Dan Klien Pemasarakatan	Menurunnya Persentase Residivis Di Banten	10%	10%	100%
Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasarakatan; Dan Pengelolaan Basan Baran	Persentase Basan Baran Yang Di Kelola Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan Dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengawasan Sesuai Dengan standar Di Banten	90%	100%	111%
	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%	100%	111%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

PROGRAM/OUTPUT		PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	645.180.000	644.880.000	99,95%
	Pembinaan UPT Pemasarakatan	587.040.000	586.740.000	99,95%
	Pembinaan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	58.140.000	58.140.000	100%

PERFORMANCE TAHUN 2019

DASHBOARD PERFORMANCE				
NO	SATUAN KERJA	CAPAIAN KINERJA		PERFORMANCE
		INDIKATOR KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Ditjen Pemasarakatan	108,64%	99,95%	104,30%

REALISASI INDIKATOR KINERJA (YoY)

INDIKATOR KINERJA		2018			2019			CAPAIAN YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
2	Persentase Mantan Narapidana/ Anak Yang Berhasil Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			30%	30%		-
3	Menurunnya Persentase Residivis Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			10%	10%		-
4	Persentase Basan Baran Yang Di Kelola Sesuai Dengan Standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
5	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan Dan Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
6	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
7	Persentase Anak Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
8	Persentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengawasan Sesuai Dengan standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
9	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar Di Banten	<i>Tidak ditargetkan</i>			90%	100%		-
10	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	14	14	100%	<i>Tidak ditargetkan</i>			-
				100%		108,64%	8,64%	

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, *Performance* Bidang Pemasarakatan untuk periode tahun 2019 sebesar 104,30%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, Capaian indikator kinerja tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 8,64% (YoY) dari tahun sebelumnya. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian tersebut pada periode tahun 2019 antara lain :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan

- a. Indikator kinerja : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di Banten

Indikator kinerja tersebut telah direalisasikan dengan pelaksanaan survei mandiri IKM-IPK pada seluruh UPT Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui surat Nomor : W12.UM.01.01-2178 Hal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Survei Mandiri Berbasis Elektronik dan QR Code tanggal 7 Oktober 2019. Survei Mandiri IPK-IKM dilaksanakan pada 15 UPT Pemasarakatan selama 1 bulan mulai tanggal 21 Oktober – 22 November 2019. Hasil survei tersebut dijadikan sebagai data pendukung oleh Balitbang Hukum dan HAM untuk melaksanakan penilaian calon satuan kerja WBK/WBBM di periode tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut maka indikator kinerja terkait indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan di Banten telah tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 111%. Hasil survei mandiri IPK-IKM pada seluruh UPT di lingkungan Kantor Wilayah Banten adalah sebagai berikut :

NO	UPT Pemasarakatan	Responden	IPK		IKM	
			Skala 15	Nilai Mutu	Skala 20	Nilai Mutu
1	Bapas Ciangir	56	14,65	A	19,61	A
2	Rupbasan Serang	49	14,46	A	19,36	A
3	LP Perempuan Tangerang	43	14,36	A	19,21	A
4	Bapas Tangerang	45	14,28	A	19,25	A
5	LP Serang	50	14,24	A	19,04	A
6	Rutan Tangerang	70	13,86	A	18,67	A
7	Bapas Serang	65	13,62	A	18,34	A
8	LPKA	39	13,57	A	18,09	A
9	Rutan Pandeglang	55	13,55	A	18,08	A
10	LP Kls I Tangerang	174	13,41	B	18,02	A
11	LPAW Tangerang	51	13,46	B	18,12	A
12	LP Cilegon	47	13,32	B	17,77	B
13	Rutan Serang	40	13,07	B	17,61	B
14	LP Pemuda Tangerang	37	12,74	B	17,32	B
15	LP Terbuka Ciangir	10	13,69	A	18,58	A

Catatan :

1. Responden minimal 30 orang
2. Skor minimal untuk diusulkan WBK : IPK 13,50 dan IKM 16,00

2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Produktivitas Narapidana / Anak Menuju Manusia Mandiri Yang Berguna

- a. Indikator kinerja : Persentase mantan narapidana / anak yang berhasil di Banten

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan kelas II Serang klien pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pada klien anak selama tahun 2019 sejumlah 133 klien anak. Dengan rata-rata perbulan total klien anak yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan adalah 67 klien anak, maka dapat diketahui bahwa seluruh klien telah mendapatkan bimbingan dan pengawasan selama periode tahun 2019. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan bertujuan untuk melatih kemandirian dan meningkatkan kreativitas melalui kegiatan yang produktif. Hasil dari kegiatan produktif pada klien anak selama periode tahun 2019 diantaranya terkait Tata Boga dan Kerajinan Tangan dengan jumlah 28 anak yang berkontribusi dalam kegiatan produktif tersebut atau sejumlah 41,79% dari total rata-rata klien anak selama periode tahun 2019. Atas realisasi tersebut maka capaian indikator kinerja telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019. Kegiatan produktif pada klien anak pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kegiatan Produktif Klien Anak Tahun 2019				
NO	Jenis Kegiatan	Hasil Produk	Jumlah WBP	Mitra
1	Tata Boga	Kripik Pisang & Kerupuk Lele	3	Kemandirian
2	Kerajinan Tangan	Handy Craft	25	LPK Puspa Antariksa

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan

- a. Indikator kinerja : Menurunnya persentase residivis di Banten

Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan kelas II Serang total klien yang melakukan pengulangan tindak pidana selama tahun 2019 sejumlah 5 klien dari total 11.622 orang WBP pada 12 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten atau 0,043% dari total WBP yang melakukan pengulangan tindak pidana selama tahun 2019. Atas realisasi tersebut maka capaian atas indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan capaian sebesar 100%.

4. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; dan Pengelolaan Basan Baran

- a. Indikator kinerja : Persentase Basan Baran yang di kelola sesuai dengan standar di Banten

Realisasi Basan Baran yang dikelola melalui sistem SDP telah mencapai 100% atau